
MODEL KOLABORASI PENGEMBANGAN GEOPARK BAYAH DOME

Mas Moch. Fathahillah*, Julianes Cadith

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract

A geopark is a geographical area that has a prominent geological heritage site and is part of a holistic concept of protection, education and sustainable development. Geoparks do not only include geological sites, but also have clear geographical boundaries and the synergy between the geological, biological, and cultural diversity that exists within the area. Communities living in the legacy play a role in protecting and enhancing the function of the natural heritage. The purpose of this research is to describe a collaboration model that is in accordance with the conditions in the development process of the Bayah Dome Geopark. This research is descriptive research with a qualitative approach. Qualitative research was conducted because this research requires in-depth information with the aim of identifying the roles of collaborative actors in the development of the Bayah Dome Geopark. This study uses descriptive research in order to determine the Bayah Dome Geopark Development Collaborative Model which involves many stakeholders. The results of this study are that there are 8 collaborative processes that occur in the development of the boyah dome geopark, namely: (1) Network Structure, (2) Commitment To Common Purposes, (3) Trust Among Participants, (4) Governance, (5) Access To Authority, (6) Distributive Accountability, (7) Access To Resources, (8) Information Sharing

Keywords:

Geopark, tourism, collaboration, development.

Article history:

Submission February 3 2022

Revision June 02 2022

Accepted June 26 2022

Published June 30 2022

Abstrak

Geopark adalah wilayah geografis yang memiliki situs warisan geologi terkemuka dan bagian dari konsep holistik perlindungan, pendidikan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Geopark tidak hanya mencakup situs geologi, tetapi memiliki batas geografis yang jelas serta sinergitas antara keragaman geologi, hayati, dan budaya yang ada di dalam kawasan tersebut. Masyarakat yang tinggal di dalam lawasan berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan model kolaborasi yang sesuai dengan kondisi dalam proses pengembangan Geopark Bayah Dome. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan karena penelitian ini membutuhkan informasi yang mendalam dengan tujuan untuk mengidentifikasi peran-peran aktor kolaborasi dalam pengembangan Geopark Bayah Dome. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif agar dapat menentukan Model Kolaborasi Pengembangan Geopark Bayah Dome yang melibatkan banyak stakeholders. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat 8 proses kolaborasi yang terjadi dalam pengembangan geopark boyah dome yaitu : (1) Network Structure, (2) Commitment To Common Purposes, (3) Trust Among Participants, (4) Governance, (5) Access To Authority, (6) Distributive Accountability, (7) Access To Resources, (8) Information Sharing.

*Corresponding author

Email:

Fathahillah05@gmail.com

Keyword: geopark, pariwisata, kolaborasi, pembangunan

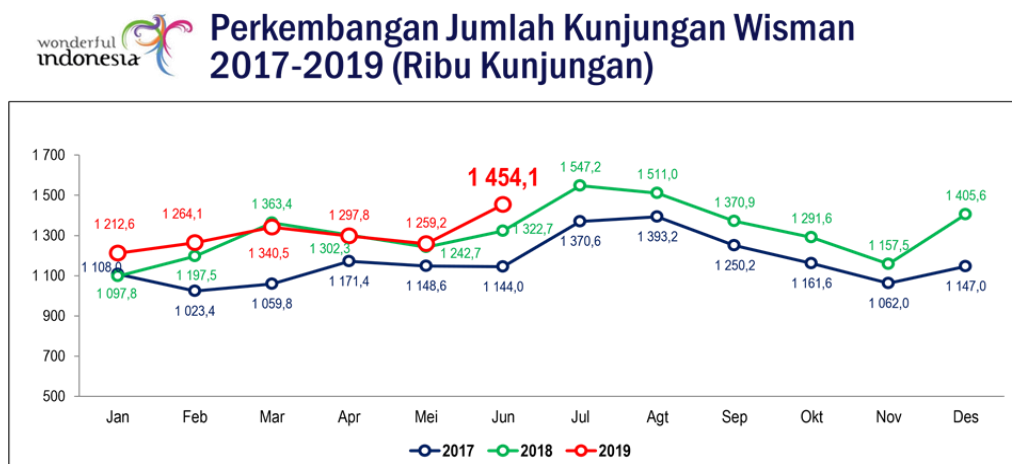
PENDAHULUAN

Dinamika kultur dan perkembangan zaman telah secara nyata merubah konstelasi kehidupan, budaya serta segala hal yang berkaitan dengan keseharian, telah berganti dan akan terus berganti waktu demi waktu, demikian pula dengan kebutuhan primer manusia, semakin bertambah seiring dengan kemajuan perekonomian suatu bangsa. Meningkatnya aktivitas ekonomi suatu bangsa membawa konsekuensi rutinitas yang menyebabkan tingkat kebosanan yang semakin meningkat pula, waktu dan periode yang terus bergerak maju, menjadi faktor penting perihal pergeseran hakikat menjalani hidup, kesuksesan dan kenyamanan hidup tidak lagi dilihat dari capaian sukses pekerjaan, namun telah terjadi shifting need ke aspek eksplorasi dan discovery.

Sikap manusia sebagai reaksi terhadap sesuatu, dapat dipastikan berbeda jika membandingkan kondisi dewasa ini dengan masa lampau. Sebuah bukti nyata dari manifesto term "modernisasi". Perubahan, terjadi di semua lini baik sosial, budaya, dan ekonomi. Manusia, mau tidak mau harus mampu beradaptasi siap menghadapi disrupsi. Segala hal, cepat atau lambat akan terpaksa dan dipaksa berubah mengikuti perkembangan zaman. Begitu juga gaya hidup, yang berkembang sebagai dampak dari perubahan zaman, yang salah satunya dapat dicermati dari semakin meningkatnya kebutuhan akan rekreasi, mengeksplorasi hal-hal baru yang didapat dari sektor pariwisata, hal inilah yang menjadikan pariwisata semakin mendapatkan tempat strategis dalam kehidupan manusia modern.

Peran strategis pariwisata dalam perekonomian di suatu negara, diprediksi akan semakin meningkat pada masa-masa mendatang, karena pariwisata mampu mentransformasi diri ke dalam kelompok industri terbesar dunia (The World's Largest Industry), pariwisata akan memainkan peran sentral dalam meningkatkan pendapatan negara, devisa dan penciptaan lapangan kerja. Dijadikannya pariwisata sebagai lokomotif baru pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah senyatanya merupakan pilihan kebijakan strategis yang tepat, merujuk pada hasil Studi Bank Dunia, yang menegaskan peran penting sektor pariwisata bagi pembangunan berkelanjutan, mendorong pertumbuhan GDP, meningkatkan intensitas perdagangan internasional, menaikkan investasi global, disamping berperan dalam mengangkat negara-negara berpendapatan rendah (low-income countries).

Pariwisata Indonesia sudah mendapatkan pengakuan global, sebagai destinasi terindah di dunia, Bali dinobatkan sebagai The Best Destination in The World oleh TripAdvisor 2017 (Sumber: TripAdvisor.com), Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam terindah di muka bumi. Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya peringkat keenam untuk negara terindah di dunia versi "Rough Guides", publisher ternama Inggris. Berbagai capaian tersebut, sudah barang tentu membawa konsekuensi kemanfaatan yang nyata pariwisata sebagai lokomotif baru bagi ekonomi Indonesia.



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Wisman Tahun 2017-2019.

Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Dari periode 2017-2019 wisatawan asing yang berwisata ke Indonesia terjadi peningkatan. Tentu ini adalah sebuah indikator yang menunjukkan bahwa kualitas pariwisata Indonesia sudah cukup baik, apalagi dengan kekayaan alam dan potensi pariwisata yang luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Bahkan pariwisata Indonesia sudah menjadi prioritas bagi para wisatawan mancanegara sejak dulu ini terbukti dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang tahun 2019 yang lalu dikunjungi cukup banyak wisatawan contohnya adalah wisatawan dari negara-negara ASEAN.

Dengan potensi yang sangat besar ini, usaha mengembangkan dunia pariwisata Indonesia ini didukung dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyebutkan keberadaan obyek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya taraf hidup masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja mengingat semakin banyaknya pengangguran saat ini, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat. Berdasarkan UU No. 9 tahun 2009, menyerahkan sebagian urusan kepariwisataan kepada daerah. Pada era globalisasi saat ini, sektor pariwisata akan menjadi pendorong terhadap sektor ekonomi daerah. Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomis, sosial dan budaya. Akan tetapi, jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justru akan memupuk berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat terutama perekonomian daerah yang akan menjadi industri yang mengglobal. Pariwisata akan memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya.

Salah satu provinsi yang kaya dengan potensi pariwisatanya adalah provinsi Banten. Secara geografis Banten sangat menjanjikan dengan segala potensi pariwisatanya, provinsi dengan luas sekitar 9.663 km² dengan panjang garis pantai mencapai 509 km ini juga masuk kedalam prioritas 10 Bali baru yang dicanangkan pemerintah untuk membangun destinasi yang dapat menarik dunia internasional untuk berkunjung ke Indonesia. Provinsi Banten memiliki potensi wisata yang hampir tak terhingga. Mulai dari wisata alam, wisata pantai, wisata sejarah, wisata ziarah, wisata industri, wisata agro, hingga wisata belanja.

Provinsi Banten memiliki 7 destinasi wisata unggulan atau Dinas Pariwisata menggolongkannya ke dalam Seven Wonders of Banten yang terdiri dari Kawasan Kesultanan Banten, Kawasan Anyer Carita, Sawarna, Baduy, Cisadane, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Tanjung Lesung. Tanjung lesung yang ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus oleh kemenpar sebagai 10 Bali baru yang ada di Indonesia akan memberikan dampak yang sangat besar untuk pembangunan daerah di Banten lewat sektor Pariwisata.

Dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak yang cukup potensial sebagai penggerak ekonomi daerah jumlah pendapatan seperti di tabel 1.3 Masih sangat kecil untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor pembangunan daerah di Kabupaten Lebak. Kawasan wewengkon kasepuhan citorek pun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Lebak. Dari sekian banyaknya destinasi wisata di Kabupaten Lebak hanya ada empat destinasi yang memberikan dampak yang besar bagi PAD Lebak (Dinas Pariwisata Kab. Lebak). Tentu hal ini harus menjadi perhatian besar bagi Pemkab Lebak untuk mengoptimalkan pendapatan dari destinasi wisata lainnya di Kabupaten Lebak.

Bayah Dome sudah terbilang memenuhi persyaratan sebagai geopark karena di dalamnya terdapat tiga unsur pendukung yaitu Keragaman Geologi (geoheritage), Keanekaragaman hayati (Biodiversity, dan Keragaman budaya (Cultural Diversity), hal ini dibuktikan dengan data yang terdapat di tabel diatas dan gambar 1.3 yang merupakan penilaian kondisi masing-masing potensi Geopark Bayah Dome. Pemerintah pusat sendiri sudah melakukan perannya dengan cukup optimal, Kemen ESDM melakukan survei dan identifikasi potensi geosite bersama akademisi dan bapelitbangda.

Kawasan kabupaten Lebak adalah kawasan konservasi dan karena itulah konsep geopark dinilai sangat sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan karena dalam pengembangan geopark harus mengedepankan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan, akan tetapi dalam proses pengembangannya terdapat beberapa masalah. Permasalahan yang pertama, Banyaknya kepentingan yang ada, seperti PT. Cemindo Gemilang yang memiliki kepentingan perusahaan karena ada beberapa kawasan geosite yang terletak di kecamatan bayah merupakan cadangan bahan baku untuk pembuatan semen, kemudian Perum Perhutani yang memiliki kepentingan dalam konservasi tentu harus dapat

diakomodir dengan baik, kemudian adanya kepemilikan potensi geosite yang dimiliki oleh individu yang dijadikan sebagai sumber pendapatan, beberapa potensi geosite juga masuk kedalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak tentu TNGHS sebagai pengelola kawasan tersebut memiliki kepentingan konservasi hutan. Belum lagi masih banyaknya gurandil atau penambang ilegal yang tentunya akan mengganggu keberadaan geopark bayah dome dan akan muncul kesulitan dalam mengakses sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak itu sendiri.

Permasalahan yang kedua partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan juga belum terlibat secara signifikan, padahal potensi geopark ini muncul langsung dari bawah dan disampaikan langsung kepada pemda. Menurut Permen Parekraf No. 2 Tahun 2020 dalam proses pengembangan geopark sebagai konsep pariwisata berkelanjutan ini harus melalui proses Bottom Up dan kolaborasi. Menurut Munawir yang merupakan salah satu dari inisiator Geopark ini masyarakat belum terlibat secara jauh dalam proses perencanaan geopark, dan baru dilibatkan sampai dengan proses survei potensi di beberapa kawasan geopark. Bahkan, salah satu hasil wawancara dengan anak muda di tiga kecamatan yaitu sajira, cipanas, dan citorek sendiri belum mengetahui terkait dengan geopark itu sendiri, tentunya ini perlu sosialisasi secara menyeluruh terkait dengan pengembangan geopark ini karena tujuan dari pengembangann geopark itu sendiri untuk memajukan ekonomi di level masyarakat. Asosiasi pelaku pariwisata seperti Himpunan Pramuwisata, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata, dan Kelompok sadar wisata juga belum terlibat secara optimal dalam proses pengembangan geopark bayah dome ini, padahal dengan keterlibatan asosiasi pelaku pariwisata bisa memberikan masukan dan gagasan terkait dengan konsep kepariwisataan itu sendiri sehingga dengan keberadaan geopark bayah dome ini dapat memberikan multiplier effect ke segala sektor.

Permasalahan ketiga adalah salah satu syarat dalam pengembangan Geopark adalah tidak boleh ada aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Di Sekitar kawasan yang akan ditetapkan menjadi kawasan Geopark Bayah Dome ini masih banyak aktifitas tambang emas, pasir, batu bara, dan batu yang illegal, serta adanya aktivitas pertambangan berskala besar yang dilakukan oleh perusahaan swasta yang bergerak di pembuatan semen yaitu PT. Cemindo Gemilang. Tentu hal ini akan mengancam kelestarian objek geosite tersebut sehingga nilai-nilai konservasi dan edukasi di kawasan itu akan terancam.

Permasalahan keempat adalah, di dalam Perpres No. 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Geopark atau Taman Bumi, menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk ditetapkan menjadi geopark adalah adanya Badan pengelola geopark, sedangkan dalam di dalam geopark Bayah dome ini belum memiliki badan pengelola geopark. Walaupun dalam perpres tersebut juga menyebutkan bahwa kawasan yang memiliki Keragaman

Geologi (geoheritage), Keanekaragaman hayati (Biodiversity), dan Keragaman budaya (Cultural Diversity) sudah secara otomatis disebut geopark.

Selanjutnya permasalahan yang kelima, Pemkab Lebak sebenarnya sudah membuat produk kebijakan terkait dengan geopark bayah dome yaitu berupa Peraturan Bupati Lebak No. 133 Tahun 2020 tentang pengelolaan Geopark Bayah Dome, akan tetapi Perbup ini masih belum disosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Lebak secara umum dan kepada masyarakat di kawasan geopark bayah dome yang telah ditetapkan. Dalam rangka pengembangan Geopark di Kabupaten Lebak, diperlukan tata kelola geopark yang handal dan profesional. Pembagian peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten serta masyarakat harus tertuang dengan jelas dalam kebijakan daerah. Secara khusus bahwa tata kelola kawasan geopark di Kabupaten Lebak menunjukkan kondisi yang belum sinergis dan belum terpadu di antara stakeholder yang ada, baik dari sisi kebijakan maupun operasional kegiatannya. Keberadaan lembaga pengelola yang telah dibentuk di masing-masing kawasan geopark di Lebak belum mampu melaksanakan pengelolaan kawasan geopark handal, profesional dan sinergis

Kerjasama seluruh pihak guna mengimplementasikan suatu program dalam terminologi administrasi publik menyimpulkan bahwa kegagalan dalam collaborative governance disebabkan oleh masih banyak kendala terhadap kewenangan hirarki organisasi, kurangnya komitmen pemerintah, kurangnya pemahaman masyarakat, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan informasi, kurangnya melibatkan stakeholders lain seperti kapasitas pemerintah lokal. Hal ini mengartikan bahwa collaborative governance berperan penting dalam mencapai suatu tujuan tertentu, apabila collaborative governance dapat terjalin dengan baik dan optimal antara pemerintah dan stakeholder terkait maka tujuan akan tercapai secara efektif.

Adanya keterlibatan berbagai pihak jika dilakukan mapping dan identifikasi, pembangunan kawasan Geopark Bayah Dome memiliki potensi untuk memajukan daerah dengan mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki berbagai pihak. Melihat dalam proses pengembangan geopark bayah dome ini belum tersedianya forum resmi dalam proses kolaborasi sehingga rencana untuk mengembangkan kawasan ini akan tersendat. Konsep Collaborative Governance sebagai sebuah basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi kawasan Geopark Bayah Dome untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan karena penelitian ini membutuhkan informasi yang mendalam dengan tujuan untuk mengidentifikasi peran-peran aktor kolaborasi dalam

pengembangan Geopark Bayah Dome. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif agar dapat menentukan Model Kolaborasi Pengembangan Geopark Bayah Dome yang melibatkan banyak stakeholders.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode Miles & Huberman (1992) yaitu : reduksi data (*data reduction*), merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang paling penting, dan mencari tema dan polanya. Dimana reduksi data ini sebagai proses pemilihan, pengklarifikasian, pengabstraksian atau transparansi data yang diperoleh di lapangan baik melalui observasi maupun wawancara kepada informan pangkal dan informan kunci. Reduksi data merupakan bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi; paparan data (*data display*), dengan menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi dan data yang diberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya; penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusive drawing/verifying*), penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan dijadikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Network Structure

Dalam sebuah kolaborasi sangatlah dibutuhkan sebuah struktur jaringan atau network structure dalam mempermudah sebuah kolaborasi antar stakeholders. Ada beberapa struktur atau bentuk jaringan yang ada menurut DeServe dalam teorinya tentang proses kolaborasi seperti hub dan spokes, bintang, dan cluster (kumpulan terangkai dan terhubung) yang bisa digunakan. Milward and Provan (2007) dalam Sudarmono (2011:111) mengategorikan bentuk struktur kedalam tiga bentuk : *self governance, lead organization, dan network administrative (NAO)*.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti dan menurut sumber dari Milward and Provan (2007) dalam Sudarmono (2011:111) melihat struktur jaringan atau network structure yang ada dalam proses pengembangan Geopark Bayah Dome ini adalah Lead Organization. Terlihat bahwa masih dominannya stakeholders dari pemerintah hal ini terlihat dari struktur yang ada di Tim Transisi Badan Pengelola Geopark Bayah Dome, beberapa kelebihan dari struktur ini adalah salah satunya saat menentukan arah akan lebih jelas, akan tetapi dalam model ini memiliki kelemahan bahwa akan munculnya demotivasi dalam berkomitmen karena dominannya pemerintah itu sendiri. Hal ini terlihat bahwa belum munculnya ketertarikan masyarakat

untuk ikut serta ataupun antusias dengan program pengembangan Geopark Bayah Dome ini.

Padahal Menurut Peraturan Menteri parekraf No 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Taman Bumi atau geopark keterlibatan masyarakat secara aktif sangat diperlukan, bukan hanya itu menurut DeServe dalam Sudarmo (2009) mengatakan jika kolaborasi bisa saja gagal jika pendekatan yang dilakukan masih menggunakan pendekatan “top down” maka dari itu pendekatan yang harus dilakukan walaupun dengan network structure lead organization adalah “bottom up”. Memang aktor kolaborasi lainnya seperti Disbudpar, DPMPTSP, Perhutani, Balai Taman Nasional sudah sangat mendukung dari daripada pengembangan Geopark Bayah Dome itu sendiri. Bukan hanya belum terlibatnya dari Kelompok Masyarakat seperti kelompok sadar wisata, akan tetapi Tim Transisi juga belum melibatkan Media secara aktif, hal ini akan menyebabkan kesulitan dalam penyebaran informasi saat geopark bayah dome ini sudah ditetapkan.

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan, Network Structure yang digunakan sebenarnya sudah tepat, Bappelitbangda sebagai penanggung jawab dari project ini memiliki kewajiban untuk mengejawantahkan visi pemerintah daerah kabupaten lebak. Karena Bappelitbangda sebagai perencanaan sebuah program jadi Lead Organization sudah sesuai, agar network lebih optimal, para anggota dalam model ini sebaiknya cukup banyak. Hal ini bisa dipandang efektif karena model ini mengandalkan dukungan stakeholders atau anggota lainnya dalam menjalankan aktivitasnya, semakin banyak dukungan semakin efektif sebuah kolaborasi yang mengadopsi model ini. Tidak boleh ada hirarki karena tidak akan efektif, dan network structure harus bersifat organis dengan struktur yang sama, yang tidak ada hirarki kekuasaan dominasi dan monopoli, semuanya setara baik dalam hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas, dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam mencapai tujuan bersama (Ratna Trisna Dewi, 2012).

Commitment to Common Purposes

Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam collaborative governance. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi (DeSeve 2007:50). Temuan yang peneliti temukan dalam proses pengembangan geopark bayah dome ini hampir semua stakeholders dari pemerintah dan swasta sudah berkomitmen dalam melakukan kolaborasi untuk mengembangkan Geopark Bayah Dome di Kabupaten Lebak tujuan yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan Kabupaten Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal dengan. Kolaborasi yang terjadi antar stakeholders ini ditandai dengan berbagai focus group discussion yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta karena untuk mengintegrasikan berbagai hal. Pemerintah Kabupaten Lebak juga cukup berkomitmen dengan menganggarkan persiapan

pembentukan Badan Pengelola, dan persiapan Geopark Bayah Dome ini sebesar Rp. 500.000.000,00 (sumber, Pak Taufik Kasubbag PSDA Bappelitbangda Kab. Lebak)

Berdasarkan observasi terlihat pemerintah daerah belum satu padu dengan masyarakat tentang geopark bayah dome ini, terutama masyarakat yang bekerja sebagai penambang ilegal. Memang pemerintah daerah sudah memiliki komitmen dengan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak terkait dengan penambangan emas ilegal ini, akan tetapi belum adanya tindakan yang sesuai dengan komitmen yang ada. Hal ini tentu akan mengancam kelestarian kawasan Geopark Bayah dome nantinya, bahkan pelaku penambang ilegal juga mengatakan bahwa dirinya lebih baik menjadi penambang karena pendapatan yang sesuai ketimbang harus berada di sektor pariwisata.

Dalam membangun komitmen harus adanya pendekatan antar organisasi, multi-level, dan lintas sektoral (Ansell dan Gash, 2007; Ansell, 2012). Koordinasi yang dilakukan pemda untuk membangun komitmen ini juga perlu didukung dengan insentif dalam berkolaborasi, hal ini dirasa perlu karena masyarakat yang sulit melihat hasil dari suatu proses yang panjang. Pemerintah juga dapat melakukan pendekatan dengan cara mengurangi bias pro-literacy, yaitu dengan mengkomunikasikan melalui pendidikan formal dan informal. Strategi tersebut diterapkan dengan memadukan ide pembangunan dan inovasi mereka sendiri sesuai level pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki diterapkan pada kaum miskin pedesaan dan perkotaan (Melkote, 1984).

Trust Among Participants

Kepercayaan diartikan sebagai pengakuan dari pihak-pihak internal kolaborasi bahwa aktor yang terlibat dapat dipercaya dan kredibel dalam melakukan tugas dan perannya dalam kerangka kolaborasi (DeSeve 2007:50). Kepercayaan internal ini sangat penting karena merupakan elemen untuk membentuk komitmen bersama. Dalam hal pengembangan Geopark Bayah Dome ini kepercayaan sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk melancarkan proses kolaborasi, jika ada hambatan dan ada saling curiga ini akan mempersulit proses kolaborasi yang akan terjadi.

Buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan hanya tentang negosiasi antar stakeholders, namun lebih dari itu merupakan langkah untuk membangun kepercayaan satu sama lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan.

Berdasarkan teori tersebut dalam penelitian ini rasa kepercayaan antar stakeholders memang sudah terbangun sejak awal, walaupun ada sedikit berbeda pandangan tapi Bappelitbangda bisa meyakinkan semua stakeholders khususnya yang berada di sektor pemerintahan dan swasta bisa saling percaya. Akan tetapi dari masyarakat belum memiliki rasa percaya yang cukup kepada stakeholders, menurut

narasumber I5 beranggapan bahwa sudah banyak langkah yang dilakukan oleh pemerintah akan tetapi belum dapat memberikan perubahan, apalagi ini tentang pariwisata.

Hal ini bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat terkecil, masih beranggapan bahwa pariwisata belum bisa memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan di Kabupaten Lebak khususnya di daerah Lebak Selatan itu sendiri. Sosialisasi ke desa pun baru satu kali ke desa cilograng dan belum ada tindak lanjutan dari itu, maka dari itu trust issue yang berkembang di masyarakat masih cukup tinggi.

Dalam membangun kepercayaan terhadap masyarakat dan kelompok masyarakat dalam hal ini pokdarwis dan aktivis pemuda di sekitaran kawasan Geopark Bayah dome pemerintah atau Bapelitbangda Kabupaten Lebak dapat memberikan insentif untuk berkolaborasi Ansell & Gash (2007:8), insentif ini dapat berupa pemberian program tentang geopark bayah dome itu sendiri. Dalam hal ini untuk membangun kepercayaan perlu adanya program pendukung untuk memperkuat kolaborasi dan menciptakan kepercayaan antar stakeholders (Yunita Elianda dan Dian Eka Rahmawati, 2018). Tentu ini bisa menjadi sebuah best practice dalam proses pengembangan Geopark Bayah Dome dengan memperbanyak program yang menyentuh masyarakat kecil tentang geopark bayah dome dengan melibatkan kelompok masyarakat.

Governance

Salah satu unsur bagi keberhasilan sebuah jaringan atau kolaborasi adalah kejelasan tata kelola. Termasuk ke dalamnya saling percaya antar pelaku kolaborasi, ada batas-batas yang terlibat dan siapa yang tidak boleh terlibat, aturan main yang jelas yang disepakati bersama, dan kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan. Adanya kejelasan tata kelola boundary dan exclusivity, yang menegaskan siapa yang termasuk anggota dan siapa yang bukan anggota, ini berarti bahwa jika sebuah kolaborasi dilakukan, harus ada kejelasan siapa yang masuk kedalam network dan siapa yang di luar network, aturan-aturan yang menegaskan sejumlah pembatasan-pembatasan perilaku anggota komunitas dengan ancaman bahwa mereka akan dikeluarkan jika perilaku mereka tidak sesuai atau bertentangan dengan kesepakatan yang disetujui bersama.

Temuan yang peneliti lihat berdasarkan hasil observasi lapangan, kejelasan dalam pembagian tugas ini belum muncul, walaupun sudah ada exclusivity yaitu siapa saja yang bisa terlibat dalam pengembangan geopark bayah dome ini dengan dibentuknya Tim Transisi. Dengan aktor kolaborasi yang dominan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dengan tujuan agar nantinya geopark bayah dome ini sudah siap terlebih dahulu secara regulasi. Lalu masih banyak aktor kolaborasi yang belum paham tentang geopark itu sendiri hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan pak usep suparno kasi destinasi di Disbudpar Lebak.

Hasil temuan di lapangan menggambarkan bahwa aksi yang dilakukan oleh Tim Transisi dan pemerintah belum begitu signifikan. Pemerintah masih kurang mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan Geopark Bayah Dome ini dan dalam melakukan sosialisasi secara berkala terhadap masyarakat.

Menurut peneliti seharusnya pembagian tugas dalam pengembangan geopark bayah dome ini sangat diperlukan. Jaringan yang sudah terbentuk saat ini perlu menambah kembali aktor-aktor yang harus terlibat seperti media, kelompok masyarakat yang bergerak di kepariwisataan, perguruan tinggi, dan kalangan profesional di bidang bisnis pariwisata, sehingga jaringan yang terbentuk saat ini tidak hanya melihat dari kacamata pemerintah melainkan bisa melihat secara luas sehingga menghasilkan regulasi dan tata kelola yang inklusif.

Untuk meningkatkan hal ini maka kebebasan dalam melakukan kolaborasi sangat dibutuhkan kejelasan tugas atau fungsi dari setiap partisipan serta kebebasan institusi dalam menjalankan perannya sesuai dengan komitmen dan tujuan bersama dan perlu dilakukan untuk memperjelas tugas serta fungsi adalah dengan meningkatkan otoritas serta kebebasan dari aktor/partisipan yang terlibat dalam kolaborasi. Dalam hal pengembangan geopark bayah dome ini maka peran-peran seperti media, kelompok masyarakat, dan instansi pemerintah sendiri perlu ditingkatkan keterlibatannya.

Access to Authority

Menurut DeServe sendiri (DeSeve, 2007:50) mengatakan bahwa *aces to Authority* adalah tersedianya standar-standar, ukuran-ukuran atas prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Bagi kebanyakan jaringan, mereka harus memberikan kesan kepada salah satu anggota jaringan untuk memberikan otoritas hal ini dilakukan untuk mengimplementasikan keputusan atau dalam menjalankan tugas.

Dalam kasus pengembangan Geopark Bayah Dome terdapat beberapa langkah dan prosedur yang dilakukan untuk mempermudah koordinasi antar stakeholders. Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya adalah mengundang aktor kolaborasi di dalam Forum diskusi yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal ini adalah Bappelitbangda Kabupaten Lebak. Bappelitbangda juga membentuk Tim Transisi guna untuk mempermudah dalam proses pengembangan Geopark Bayah Dome yang akan ditetapkan. Dalam pengembangan Geopark Bayah Dome ini, Bappelitbangda sebagai leading sector dari pengembangan ini, sudah mampu membagi tugas dan wewenang kepada aktor kolaborasi dari pihak pemerintah, seperti Disbudpar, DPMPTSP, Biro Hukum Setda Lebak. Tetapi Bappelitbangda masih belum dapat memberikan tugas atau wewenang kepada partisipan kolaborasi non-pemerintah, seperti pokdarwis, organisasi non-pemerintah, dan media itu sendiri.

Menurut Bappelitbangda ini dikarenakan belum ada penetapan yang sah dari Kementerian ESDM maka belum melibatkan banyak pihak. Tetapi menurut pandangan

peneliti keterlibatan banyak pihak seperti yang disebutkan di atas akan mempermudah tugas kedepan. Sehingga program pengembangan Geopark Bayah Dome ini bisa diketahui banyak orang di Kabupaten Lebak sehingga dapat menimbulkan awareness. Dalam hal pengembangan geopark bayah dome ini diperlukan penjelasan dan sosialisasi lebih detail kepada partisipan yang mengambil peran dalam proses kolaborasi pengembangan geopark bayah dome ini. Regulasi yang menjadi asas lintas sektoral untuk mengakses otoritas sangat diperlukan untuk kasus pengembangan geopark bayah dome ini, argument ini selaras dengan Jurnal berjudul Collaborative Governance in HIV and AIDS Prevention in Sleman District 2018 hasil penelitian dari Yunita Elianda dan Dian Eka Rahmawati dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Distributive Accountability

Dengan berbagi governance (pengelolaan, penataan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholders lainnya) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan pada seluruh anggota network (jaringan), dan membagi tanggung jawab dengan demikian dapat mencapai hasil yang diinginkan. Jika para anggota tidak terlibat dalam menentukan tujuan network dan tidak berkeinginan membawa sumber daya dan otoritas ke dalam network, maka kemungkinan network ini akan gagal mencapai tujuan. Dalam proses pengembangan Geopark Bayah Dome ini keterukaan dan distribusi tanggung jawab sangat dibutuhkan untuk menyamakan persepsi antar stakeholders dan masyarakat itu sendiri. Dalam pengembangan Geopark Bayah Dome ini, Bappelitbangda sebagai inisiator pengembangan geopark bayah dome sudah cukup baik dalam merangkul stakeholders yang terkait.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007) dalam proses pengemabnagn geopark bayah dome ini Bapelitbangda sebagai leading sector dalam pengembangan geopark bayah dome ini cukup berhasil dalam merangkul stakeholders yang lainnya untuk bekerjasama, ini dibuktikan dengan penandatanganan MoU dan seringnya melakukan Focus Group Discussion baik secara formal maupun non-formal. Dalam pengembangan Geopark Bayah Dome ini perlu adanya pembagian tanggung jawab yang lebih jelas kepada aktor kolaborasi yang ikut serta. Keterbukaan dalam perencanaan dan implementasi perlu ditingkatkan kembali oleh pemerintah, terutama dalam melakukan sosialisasi Peraturan kepada masyarakat (Ratnas Trisuma Dewi, 2012).

Access to Resources

Dalam konteks kolaborasi akses terhadap sumber daya adalah ketersediaan sumber daya keuangan, teknis, sumber daya manusia, dan lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan sebuah jaringan DeSeve (2007:08). Sumber Daya disini bukan hanya sumber daya manusia, akan tetapi bisa mencakup dari kekuatan anggaran, dan objek pembangunan itu sendiri. Dalam penelitian ini akses terhadap sumber daya bisa

diartikan tentang potensi geosite itu sendiri. Dalam proses pengembangan Geopark Bayah Dome ini ada beberapa lahan yang dimiliki oleh masyarakat, dan swasta yang masuk dalam rencana geopark bayah dome ini.

Melihat data yang telah dikumpulkan bahwa untuk lahan yang dimiliki oleh swasta bisa diakses dan bahkan didukung oleh pemiliknya. Akan tetapi di masyarakat belum ada komunikasi yang lebih lanjut, baru tahapan survey. Lahan-lahan yang dimiliki oleh instansi lain selain Pemkab Lebak ataupun oleh swasta, maupun masyarakat sendiri harus dilakukan perjanjian kerja sama secara tertulis dengan pihak terkait untuk menjaga dan melakukan diseminasi pemanfaatan (Shafira Mediana Putri, 2019)

Kesulitan yang kedua adalah, lahan-lahan yang dekat dengan pertambangan emas ilegal dan aktivitas penambangan legal yang dimiliki oleh swasta. Ini akan menjadi kesulitan bilamana tidak ada soft approaching yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di lubang-lubang galian emas ilegal. Keengganan masyarakat yang ikut dalam aktivitas penambangan beralih ke pariwisata akan menjadi masalah dan penetapan geopark bayah dome oleh kementerian akan terganggu.

Ketiga adalah, Sumber daya manusia menjadi permasalahan besar, kurangnya pengetahuan tentang geopark bayah dome juga akan menghambat kedepannya. Diakui oleh Bappeditbangda bahwa SDM di Kabupaten Lebak khususnya di kawasan geopark belum kuat. Organisasi atau lembaga juga belum terbentuk sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Disbudpar. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggalakan program-program yang terkait, dan melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat (Yunita Elianda dan Dian Eka Rahmawati, 2020).

Keempat adalah anggaran. anggaran yang dimiliki oleh pemda cukup untuk pembiayaan geopark bayah dome ini sebesar Rp. 500.000.000,00 (Sumber : Kasubbag PSDA Bappelitbangda Lebak), walaupun tidak sama dengan daerah-daerah lain, pemda juga merencanakan untuk segera mendatangkan investor melalui rencana-rencana strategis investasi melalui DPMPTSP itulah mengapa mereka dilibatkan. Perum Perhutani juga mengatakan bahwa modal dana akan menjadi hambatan bagi pengembangan geopark bayah dome di Kabupaten Lebak. Dalam hal ini karena keterbatasan jumlah anggaran, maka pemerintah daerah perlu bersinergi dengan stakeholders diluar pemerintah untuk melakukan kajian dan rancangan potensi investasi di kawasan Geopark Bayah Dome.

Sejauh ini akses terhadap sumber daya memang masih belum berjalan optimal, langkah-langkah yang dilakukan pemda dan stakeholders lainnya cukup berjalan optimal dengan menyusun perbup, membentuk tim transisi, membentuk geopark youth forum, dan membuat rencana investasi untuk calon investor.

Information sharing

Merupakan komponen dalam proses kolaborasi untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi bagi para anggota, serta perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas diri seorang) dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota selama bisa diterima oleh semua pihak. Kemudahan akses ini bisa mencakup sistem, informasi, peraturan, dan prosedur yang mudah De Seve (2007:08). Dalam penelitian ini, pembagian informasi dalam proses pengembangan Geopark Bayah Dome masih belum berjalan optimal. Dari beberapa sumber yang telah diwawancarai dalam pengembangan geopark bayah dome dalam hal menyebarkan informasi masih cukup lemah, ini terbukti masih belum satu pemahaman terkait dengan geopark bayah dome ini.

Sosialisasi Perbup No. 133 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Geopark Bayah Dome diakui belum dilakukan karena menurut Pemerintah mereka menunggu hasil dari penetapan Geopark Bayah Dome ini. Akan tetapi hal ini bisa menjadi masalah ketika masyarakat tidak tahu lebih banyak tentang geopark bayah dome. Bahkan masyarakat di sekitar kawasan geopark bayah dome tepatnya di Desa Cilograng, Kecamatan Cilograng baru mendapatkan satu kali sosialisasi tentang geopark bayah dome. Padahal di desa tersebut memiliki banyak sekali potensi geopark.

Pemda Lebak juga belum melibatkan media sebagai kolaborator dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Selama ini pemberitaan di media sosial maupun mainstream adalah hasil inisiatif dari media itu sendiri, tetapi dalam pelaksanaannya media kurang dilibatkan secara aktif dalam proses pengembangan geopark bayah dome ini. Keterlibatan media dirasa sangat penting untuk melakukan penyebaran informasi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pemerintah. Tidak semua masyarakat lebak sudah bisa mengakses internet dengan baik, hal ini perlu ada keterlibatan media mainstream, untuk melakukan sosialisasi. Bahkan visi pariwisata Kabupaten Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal tidak akan tercapai bila sosialisasi kepada masyarakat yang berada di kawasan terpencil tidak tersentuh.

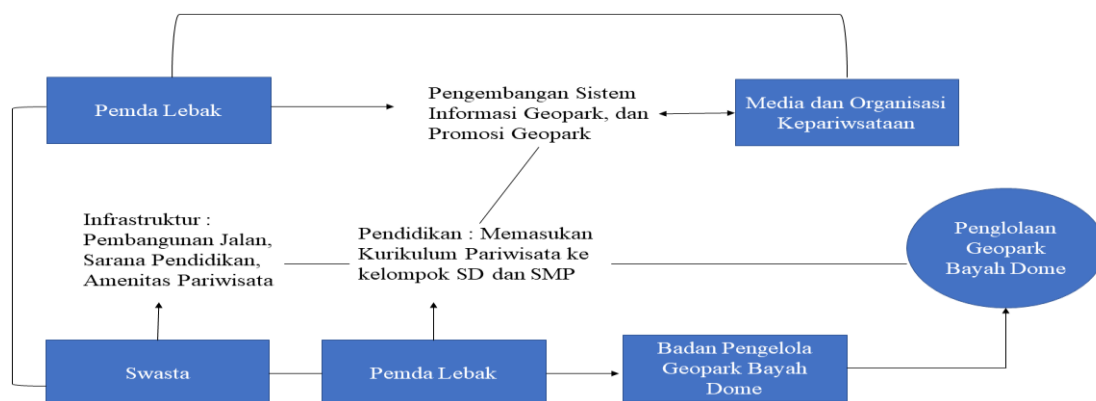
Membuat data informasi yang terkoordinasi dan masif dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, ataupun aktor kolaborasi yang dapat mengakses informasi tersebut. Sehingga koordinasi antar stakeholder dan pendekatan kepada masyarakat juga bisa berjalan harmonis, karena basic information sudah mereka dapatkan (Yunita Elianda dan Dian Eka Rahmawati, 2020). Hal ini bisa menjadi contoh bagi pemda lebak dalam mengembangkan Geopark Bayah Dome, masih banyaknya masyarakat yang kesulitan dan bahkan belum tau Geopark Bayah Dome itu sendiri akan menghambat proses pengembangan Geopark Bayah Dome nantinya.

Pemerintah bisa melakukan *basic literacy* yaitu dengan mengkomunikasikan melalui pendidikan formal dan informal. Strategi tersebut diterapkan dengan memadukan ide pembangunan dan inovasi mereka sendiri sesuai level pengetahuan dan

pendidikan yang dimiliki sesuai dengan kultur yang ada (Melkote,1984). Pemerintah juga bisa mengaktifkan komunitas Geopark Bayah Dome Youth Forum yang sudah terbentuk dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, jika tidak bisa melibatkan banyak pihak di dalam Tim Transisi Geopark Bayah Dome. Maka penyebaran informasi tentang geopark bayah dome bisa lebih optimal.

Model Kolaborasi

Dalam Model Kolaborasi Pengembangan Geopark Bayah Dome ini bisa menggunakan konsep dari Public-Private Partnership dengan Swasta nantinya yang berperan dalam proses pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan melakukan kajian profit terhadap Kawasan Geopark Bayah Dome. Sedangkan pemda nantinya fokus kepada engagement ke masyarakat, pembuatan regulasi, dan melakukan kajian strategis dan kajian risiko terhadap Kawasan geopark bayah dome. Aktor-aktor dari pemerintahan masih diperlukan untuk terlibat sehingga tetapi fungsinya adalah sebagai controlling dari proses pengembangan Geopark Bayah Dome.



Gambar 2. Model Kolaborasi

Pemda Lebak dan Swasta bisa bekerja sama dalam proses pembangunan infrastruktur seperti jalan, amenitas pariwisata seperti hotel, lalu juga swasta dapat membangun amenitas yang lainnya dengan kebijakan yang sesuai dari pemerintah daerah. Swasta dan pemerintah juga dapat berkolaborasi dalam pengembangan sistem informasi pariwisata yang terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak, yang nantinya oleh media dan organisasi kepariwisataan lainnya dapat disebarluaskan kepada masyarakat

Pemda lebak melalui dinas pendidikan bisa memasukan kurikulum tentang pengetahuan kepariwisataan dasar di kelompok SD/SMP agar kesadaran pentingnya pariwisata bisa terbangun sejak dini. Program-program tentang pariwisata dapat

dikerjakan bersama organisasi kepariwisataan seperti Kelompok Sadar Wisata, dengan dukungan dari swasta melalui asosiasi-asosiasi pelaku usaha pariwisata seperti PHRI, dan ASITA, program-program ini dapat langsung menyentuh kepada masyarakat. Pemerintah daerah dan Swasta juga dapat melakukan perjanjian kerja sama dan skema untuk melakukan penyerapan tenaga kerja lokal untuk tenaga kerja di sektor pariwisata sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada program pariwisata bisa bertumbuh seiring berjalannya waktu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah diutarakan, menyimpulkan bahwa Model Kolaborasi Dalam Pengembangan Geopark Bayah Dome ini belum berjalan optimal dan sebagaimana mestinya, berikut adalah point-point kesimpulan yang cukup penting dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

Masih dominannya peran aktor kolaborasi pemerintah daerah dalam proses kolaborasi pengembangan geopark bayah dome. Dalam proses pengembangan geopark bayah dome ini juga belum melibatkan stakeholders lain seperti sector dunia usaha, kelompok pariwisata, dan media itu sendiri, masih minimnya program-program untuk menumbuhkan kepekaan masyarakat tentang Geopark Bayah Dome. Sehingga munculnya trust issue tentang keberhasilan program geopark bayah dome ini yang dating dari masyarakat sekitar kawasan geopark bayah dome, masih kurangnya penyebaran informasi tentang geopark bayah dome khususnya di daerah-daerah yang masuk kedalam kawasan geopark bayah dome, masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang geopark bayah dome akan menyulitkan pengelolaan geopark bayah dome kedepan. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian Model Kolaborasi Pengembangan Geopark Bayah Dome sebagai berikut: pemerintah perlu lebih aktif dalam melibatkan aktor kolaborasi dari sektor lain seperti dunia usaha dalam hal ini Kadin Lebak, Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata, Media, dan Kelompok Masyarakat itu sendiri. Pemerintah juga perlu melakukan pendekatan “bottom-up” dalam proses kolaborasi ini; pemerintah perlu mengadakan program-program yang berkaitan dengan edukasi geopark yang bisa menyentuh masyarakat sekitar kawasan geopark bayah dome; para aktor kolaborasi perlu melakukan pendekatan persuasif dan terstruktur terhadap masyarakat, terutama para penambang liar yang enggan meninggalkan profesinya. Lalu meningkatkan literasi kepariwisataan terhadap kelompok usia muda di Kabupaten Lebak perlu dipertimbangkan

REFERENSI

Putri Meidiana Shafira, 2019. Kolaborasi Pengembangan Kawasan Geopark Dalam Mewujudkan Destinasi Pariwisata Berkelas Dunia Di Provinsi Jawa Barat, Universitas Padjadjaran, Program Studi Magister Kebijakan Publik, Vol 2 No. 2

-
- Dewi Trisuma Ratna (2012), "Faktor – Faktor yang mempengaruhi Collaborative Governance dalam Pengembangan Industri Kecil (studi kasus Kerajinan Reog dan Pertunjukan Reyog di Kabupaten Ponorogo), Program Pasca Sarjana, Universitas Sebelas Maret.
- Mochammad Rozikin, (2018). Model Collaborative Governance Dalam Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Indigenous Tourism. Vol 14 No.4.
- Yunita Elianda dan Dian Eka Rahmawati. (2020). Collaborative Governance in HIV and AIDS Prevention in Sleman District 2018. Vol 4, No. 1
- Yunita Elianda & Dian Eka Rahmawati, 2020, UMT. Collaborative Governance Collaborative Governance in HIV and AIDS Prevention in Sleman District 2018. Vol 4, No. 1
- DeSeve. 2007. Creating Managed Networks as a Response to Societal Challenges. Providing Cutting-Edge Knowledge to Government Leaders The Business Of Government. Washington